



Judul : Perempuan, Demokrasi, dan Masa Depan Politik Representatif Indonesia
Tanggal : Selasa, 02 Juni 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 7

Perempuan, Demokrasi, dan Masa Depan Politik Representatif Indonesia

Nurul Arifin

Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertegas kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan legislatif layak diapresiasi sebagai langkah penting dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Keputusan ini bukan sekadar soal aturan administratif pemilu, melainkan juga bagian dari perjalanan panjang bangsa untuk memastikan politik menjadi ruang yang terbuka dan adil bagi semua warga negara, termasuk perempuan.

Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari seberapa rutin pemilu dilaksanakan, tetapi juga dari seberapa luas ruang partisipasi dibuka bagi kelompok-kelompok yang selama konteks itulah, keterwakilan perempuan menjadi penting.

Perjalanan perempuan di parlemen Indonesia sesungguhnya menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Pada Pemilu 1999, keterwakilan perempuan di DPR baru berada di angka 8,2 persen. Pada Pemilu 2004 meningkat menjadi 11,5 persen, kemudian 18 persen pada 2009. Setelah sempat turun menjadi 17,3 persen pada 2014, angka itu kembali naik menjadi 20,5 persen di 2019.

Kini, pada periode DPR 2024-2029 jumlah anggota perempuan mencapai 127 orang dari total 580 anggota DPR atau sekitar 21,9 persen. Ini merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah parlemen Indonesia. Angka tersebut tentu belum ideal. Namun, setidaknya kita melihat arah perubahan yang positif. Masyarakat Indonesia semakin terbuka terhadap kepemimpinan perempuan dan semakin memahami bahwa kapasitas politik tidak ditentukan oleh gender.

Di Partai Golkar sendiri, komitmen terhadap keterlibatan perempuan bukan hal baru. Pada periode DPR 2024-2029 Fraksi Partai Golkar memiliki 21 anggota perempuan dari total 102 kursi di DPR. Artinya, sekitar 20,5 persen anggota Fraksi Golkar di parlemen adalah perempuan. Yang lebih penting, perempuan di Golkar tidak hanya hadir sebagai pelengkap daftar calon legislatif.

Mereka dipercaya menduduki posisi-posisi strategis baik di parlemen maupun di struktur partai. Ada yang memimpin komisi, menjadi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), hingga mengemban amanah penting dalam ke-

pengurusan DPP Partai Golkar.

Ini menunjukkan bahwa ruang kepemimpinan perempuan di Golkar terus terbuka dan berkembang. Bagi kami, politik modern harus dibangun di atas meritokrasi, kompetensi, dan kerja nyata. Namun, yang juga sangat penting adalah implementasi dari seluruh keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Jangan sampai regulasi sudah progresif, tetapi pelaksanaannya belum maksimal di lapangan.

Penyelenggara pemilu harus memiliki komitmen untuk benar-benar menindak partai politik yang tidak mengikuti keputusan MK terkait keterwakilan perempuan. Penegakan aturan harus dilakukan ngal *affirmative action* tidak berhenti hanya sebagai norma di atas kertas.

Selain itu, kita juga masih memiliki pekerjaan rumah besar terkait dengan implementasi Putusan MK Nomor 169/PUU-XVII/2024 yang secara tegas mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam AKD di DPR.

Melalui putusan tersebut, MK menegaskan bahwa keterwakilan perempuan harus berlaku secara proporsional di seluruh struktur AKD, baik dalam keanggotaan maupun posisi pimpinan komisi dan badan di parlemen.

Sayangnya, sampai hari ini implementasinya belum sepenuhnya terlihat secara nyata. Kita memahami bahwa di parlemen terdapat dinamika politik, kebijakan internal, proses negosiasi, dan lobi antarpolusi yang sangat kompleks. Namun, substansi putusan MK seharusnya tetap menjadi pedoman utama.

Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa keterwakilan perempuan di tingkat pimpinan AKD juga harus benar-benar direalisasikan. Jangan sampai perempuan hanya hadir dalam jumlah, tetapi belum memperoleh ruang kepemimpinan yang setara dalam proses pengambilan keputusan strategis parlemen.

Saya juga melihat bahwa meningkatkan keterwakilan perempuan bukan hanya fenomena Indonesia. Negara-negara Nordik, seperti Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Denmark, telah lama menunjukkan bagaimana tingginya representasi perempuan dalam politik dapat berjalan seiring dengan kualitas tata kelola publik yang baik.

Negara-negara tersebut dikenal memiliki sistem pendidikan yang maju, tingkat transparansi tinggi, pelayanan sosial yang kuat, serta kualitas demokrasi yang stabil. Tentu tidak otomatis semua politik perempuan lebih baik daripada laki-laki. Politik tetap membutuhkan kapasitas, integritas, dan kepemimpinan yang kuat dari siapa pun.

Namun, keberagaman perspektif dalam parlemen membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih kaya dan lebih representatif. Kehadiran perempuan menghadirkan sensitivitas tambahan terhadap isu pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, literasi digital, kesejahteraan keluarga, hingga pembangunan-

Kolaboratif

Pengalaman saya selama berada di dunia politik memperlihatkan bahwa perempuan sering membawa pendekatan yang lebih kolaboratif dan komunikatif dalam menyelesaikan persoalan publik. Dari di tengah kompleksitas tantangan bangsa hari ini, kemampuan membangun dialog dan empati justru menjadi kebutuhan penting dalam kepemimpinan.

Karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman bagi partai politik, tetapi sebagai momentum untuk memperkuat kaderisasi perempuan secara serius dan berkelanjutan. Partai politik harus mulai melihat perempuan bukan sebagai simbol elektoral, melainkan sebagai aset kepemimpinan bangsa.

Ke depan, tantangan kita bukan hanya menambah jumlah perempuan di parlemen, melainkan juga memastikan perempuan benar-benar hadir dalam ruang pengambilan keputusan strategis, memiliki kesempatan memimpin, dan memperoleh dukungan politik yang setara. Demokrasi yang matang bukan demokrasi yang hanya memberi kursi, melainkan demokrasi yang memberi juga kesempatan yang adil untuk memimpin.

Demokrasi Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang bagi perempuan untuk tumbuh, memimpin, dan ikut menentukan arah masa depan negara. Sebab, demokrasi yang benar-benar matang adalah demokrasi yang mampu menghadirkan seluruh suara masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan nasional.